

BALÁZS KÁNTÁS

PERANGKAT POS
NEGERI SEMBILAN
MALAYSIA
1891–1941



Penyusun katalog perangkat elektronik:

Dr. Balázs Kántás PhD

ISBN 978-615-7015-11-1

Penerbit yang bertanggung jawab:

Dr. Zoltán Zsávolya PhD

**HUNGARICA ELECTRONICA
BUDAPEST, 2025**

GARIS BESAR SEJARAH NEGERI SEMBILAN MALAYSIA DAN FILATELINYA SEJAK AWAL TAHUN 1800-AN SAMPAI AKHIR PERANG DUNIA II

Negeri Sembilan adalah salah satu negara bagian Malaysia saat ini, yang terletak di bagian barat Semenanjung Malaya. Luasnya 6686 km², dengan populasi sekitar 1 juta jiwa. Pada awal abad ke-19, sistem sosial dan politik Negeri Sembilan masih sangat terikat dengan tradisi Minangkabau, terutama adat perpatih, yaitu hukum adat dari garis keturunan ibu. Sistem ini tidak hanya mengatur kepemilikan tanah dan warisan, tetapi juga menjaga kohesi sosial masyarakat. Provinsi-provinsi (luak) dipimpin oleh kepala suku dan klan lokal, yang secara

kolektif memilih penguasa yang menyandang gelar Yang di-Pertuan Besar. Struktur politik ini berfungsi sebagai aliansi longgar, tetapi tidak bebas dari persaingan internal yang sering melemahkan persatuan negara. Negeri Sembilan pada paruh pertama abad ke-19 memiliki kedaulatan yang terbatas, dan kekuasaan lebih terkonsentrasi di tangan bangsawan lokal, kepala keluarga, dan kepala suku daripada di tangan penguasa formal.

Pada pertengahan abad ke-19, kehidupan ekonomi di wilayah tersebut secara bertahap berubah. Maraknya penambangan timah dan emas serta masuknya pedagang dan penambang Tionghoa menciptakan lapisan sosial baru. Namun, perubahan ekonomi ini disertai dengan meningkatnya ketidakstabilan politik. Perebutan kekuasaan menjadi hal yang lumrah di antara para pemimpin lokal, yang sering kali melibatkan penguasa negara-negara Melayu lainnya, seperti Johor, Selangor, atau

Perak. Situasi ini semakin membuka peluang bagi Inggris untuk memperkuat pengaruhnya, yang terus meningkat karena pentingnya wilayah ini secara ekonomi.

Pengaruh Inggris menjadi sangat dominan di Negeri Sembilan pada tahun 1870-an, setelah penandatanganan Perjanjian Pangkor pada tahun 1874, ketika Inggris secara aktif terlibat dalam pembentukan tatanan politik Semenanjung Malaya. Di Negeri Sembilan, konflik antara negara-negara Melayu Sungai Ujong dan Rembau memberikan kesempatan bagi Inggris untuk campur tangan, yang disertai dengan kehadiran militer dan tekanan politik. Pada tahun 1889, Inggris secara resmi menunjuk residen pertama mereka, yang pada dasarnya mengakhiri otonomi penuh. Meskipun lembaga penguasa yang menyandang gelar Yang di-Pertuan Besar tetap ada, kekuasaannya secara bertahap menjadi formal, dan pengaruh politik

Inggris serta perspektif kolonial semakin mendominasi negara tersebut.

Pada tahun 1895, Negeri Sembilan bergabung dengan kelompok kolonial bernama Federated Malay States, yang dibentuk oleh Inggris di wilayah tersebut untuk menyederhanakan administrasi dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Integrasi ini membawa perubahan mendasar dalam masyarakat, politik, dan ekonomi: selain pembangunan infrastruktur modern (kereta api, jalan, badan administratif), ekonomi semakin bergantung pada perkebunan karet dan pertambangan. Tenaga kerja yang dibutuhkan untuk produksi industri disediakan oleh pemerintah Inggris dari Cina dan India, yang membuat provinsi ini menjadi beragam secara etnis. Selain petani Melayu, sejumlah besar penambang Tiongkok dan pekerja perkebunan India juga menetap di wilayah ini, dan sifat multietnis negara

yang semakin berkembang ini tentu saja menimbulkan ketegangan sosial baru.

Pada paruh pertama abad ke-20, masyarakat Negeri Sembilan menunjukkan dua wajah. Di satu sisi, lembaga adat perpatih tradisional tetap ada dan terus menentukan struktur kepemilikan tanah dan kehidupan masyarakat. Di sisi lain, administrasi Inggris, sistem ekonomi kapitalis, dan pendidikan modern secara bertahap mengubah cakrawala masyarakat Melayu setempat. Gerakan reformasi agama Islam, inisiatif pendidikan modern, dan tanda-tanda awal nasionalisme Melayu semuanya muncul, mempersiapkan jalan bagi gerakan kemerdekaan Melayu di kemudian hari.

Selama Perang Dunia II, Negeri Sembilan - bersama dengan wilayah-wilayah lain di Malaya - berada di bawah pendudukan Jepang antara tahun 1942 dan 1945. Kedatangan Jepang dengan cepat mengakhiri pemerintahan kolonial Inggris dan

membawa penderitaan dan ketakutan selama bertahun-tahun bagi penduduk setempat. Kekurangan pangan, kemerosotan ekonomi, dan kekerasan militer Jepang meninggalkan luka yang dalam pada tatanan masyarakat. Pada saat yang sama, selama masa pendudukan, organisasi paramiliter yang dipengaruhi oleh komunis, Malayan People's Anti-Japanese Army (MPAJA), semakin menguat dan melakukan perang gerilya terutama di daerah pedesaan. Pengalaman pendudukan Jepang secara mendasar mengguncang legitimasi kekuasaan Inggris dan berkontribusi pada semakin kuatnya aspirasi kemerdekaan setelah perang berakhir.

Secara keseluruhan, sejarah Negeri Sembilan dari awal abad ke-19 hingga tahun 1945 adalah tentang interaksi dinamis antara struktur politik-budaya tradisional Melayu, ekspansi kolonial Inggris, dan kekuatan ekonomi global. Selama periode ini,

provinsi ini menjadi salah satu model unik di dunia Melayu, di mana tradisi adat perpatih tetap bertahan dan berkembang di tengah-tengah modernisasi kolonial dan peristiwa-peristiwa internasional.

Mengenai sejarah penerbitan prangko dan layanan pos di negara kecil Melayu ini, perkembangan layanan pos di Negeri Sembilan - seperti halnya negara-negara Melayu kolonial lainnya - terkait erat dengan pembentukan pemerintahan kolonial Inggris pada akhir abad ke-19. Jaringan pos modern pada awalnya terkait dengan infrastruktur transportasi - kereta api, jalan raya utama - yang menghubungkan pusat-pusat pertambangan dan perkebunan. Tujuan administrasi Inggris bukan hanya untuk mempercepat pergerakan perdagangan, tetapi juga untuk memperkuat kontrol kolonial.

Perangko pertama yang digunakan di Negri Sembilan adalah perangko Straits Settlements, yaitu

perangko administrasi kolonial Inggris di pemukiman di sepanjang Selat Malaka, karena layanan pos di wilayah tersebut pada awalnya diatur dari sana.

Namun, seiring dengan menguatnya pengaruh kolonial Inggris, pada tahun 1891 muncul perangko bertuliskan “Negeri Sembilan” yang memberikan identitas pos independen kepada negara bagian tersebut. Perangko pertama ini menggambarkan motif harimau.

Pada tahun 1895, Negri Sembilan bergabung dengan kelompok koloni bernama Federated Malay States, dan pada tahun yang sama, muncul juga seri perangko independen yang terdiri dari empat nilai, yang juga menampilkan gambar harimau.

Pada tahun 1898, seri perangko jenis ini ditambah dengan nilai-nilai baru dan tentu saja variasi warna.

Perangko bertema harimau tetap digunakan dalam waktu yang cukup lama, dan Negeri Sembilan

baru memperbarui koleksi prangkonya pada tahun 1935 dengan seri empat nilai yang menampilkan lambang negara bagian kecil di Malaysia tersebut.

Pada tahun 1936, seri prangko ini juga diperluas dengan nilai dan variasi warna baru, sedangkan prangko yang menampilkan lambang negara tetap digunakan hingga tahun 1941. Antara tahun 1942 dan 1945, selama pendudukan Jepang, prangko kolonial Inggris menjadi tidak berlaku dan digantikan dengan prangko yang dicetak ulang oleh pemerintah Jepang. Perangko ini sangat dicari oleh para filatelis karena hanya beredar dalam waktu singkat dan mencerminkan perubahan politik selama masa perang.

Setelah tahun 1945, pemerintahan kolonial Inggris dipulihkan, dan Negeri Sembilan menjadi salah satu negara bagian Federasi Malaya, yang menjadi cikal bakal kemerdekaan penuh Malaya. Pada tahun 1948, prangko kolonial Inggris yang

memperingati perkawinan perak Raja George VI dengan tulisan MALAYA - NEGRI SEMBILAN tentu saja juga muncul di sini. (Saat ini, nama resmi negara bagian ini adalah Negeri Sembilan, tetapi dalam sejarah, namanya adalah Negri Sembilan, dan itulah yang tertera pada prangko tersebut.)

Federasi Negara-Negara Melayu memperoleh kemerdekaan penuh pada tahun 1957, dan Negeri Sembilan menjadi salah satu negara bagian dari negara federal Melayu yang merdeka.

SUMBER YANG DIGUNAKAN

Nigel Barley, *White Rajah. A Biography of Sir James Brooke*, London, Brown Book Group, 2002.

Adrian Bethray, *From Pirates to Philately - The Adventures of Collecting Sarawak*.

https://www.google.com/search?q=Adrian+Bethray%2C+From+Pirates+to+Philately+-+The+Adventures+of+Collecting+Sarawak.&oq=Adrian+Bethray%2C+From+Pirates+to+Philately+-+The+Adventures+of+Collecting+Sarawak.&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBBzY2M2owajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Richard Cavendish, *Birth of Sir James Brooke*, History Today. April 2003, Vol. 53, Issue 4.

W.R. Forrester-Wood, *The Stamps and Postal History of Sarawak*, Brighton, The Sarawak Specialists' Society, 1957.

G. E. Hansford-L.A. Noble, *Sarawak and Her Stamp. An Analytical Survey of all Issues from 1869 to 1934*, Isle of Wight, The Times Press, 1935.

Virginia Matheson Hooker, *A Short History of Malaysia: Linking East and West*, London, Allen & Unwin, 2003.

R. H. D. Lockhart, A Study of the Stamps of Sarawak, London, Offices of Stamp Collecting journal, 1920.

James Mackay, *Bélyegek és bélyeggyűjtés*, Budapest, Kossuth Kiadó, 2008.

Fred. J. Melville, *The Postage Stamps of Sarawak with a History of the Post Office from 1869-1906*, London, Nissen, 1907.

Anthony Millner, *The Invention of Politics in Colonial Malaya: Contesting Nationalism and the Expansion of the Public Sphere*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.

Bertram W.H. Poole, *Sarawak, A Complete History of its Postage Stamps*, London, D. Field, 1906.

Edward W. Proud, *The Postal History of British Borneo*, Proud-Bailey, East Sussex, 1987.

Edward W. Proud, *The Postal History of Malaya Vol. 1 Straits Settlements*, Proud-Bailey, East Sussex, 2000.

Edward W. Proud, *The Postal History of Malaya Vol. 2 Federated Malay States*, Proud-Bailey, East Sussex, 2000.

Edward W. Proud, *The Postal History of Malaya Vol. 2 Unfederated Malay States (Johore, Kedah, Kelantan, Perlis and Trengganu)*, Proud-Bailey, East Sussex, 2000.

Cassandra Pybus, *The White Rajahs of Sarawak: Dynastic Intrigue and the Forgotten Canadian Heir*, Vancouver, Douglas & McIntyre, 1996.

Robert Reece, *The Name of Brooke. The End of White Rajah Rule in Sarawak*, Sarawak Literary Society, 1993.

Robert Reece, *Masa Japun. Sarawak under the Japanese, 1941-1945*, Sarawak Literary Society, 1998.

Robert Reece, *The White Rajahs of Sarawak. A Borneo Dynasty*, London, Archipelago Press, 2004.

Mike Thomson, *The Stabbed Governor of Sarawak*.
<https://www.bbc.com/news/magazine-17299633>

Barbara Watson Andaya–Leonard Andaya, *A History of Malaysia*, Honolulu, University of Hawaii Press, 2001.

Neville Watterson, *Sarawak, the De La Rue Story*, London, Brock Publications, 2000.

James Brooke - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/James_Brooke

Charles Brooke - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Brooke,_Rajah_of_Sarawak

Anthony Brooke - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Brooke

British Malaya - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/British_Malaya

Postage stamps and postal history of Malaysia - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Postage_stamps_and_postal_history_of_Malaysia

Stamp Issuing Entities Of The World.

<https://www.linns.com/insights/stamp-issuing-entities-of-the-world.html>

Stanley Gibbons Commonwealth Stamp Catalogue: Brunei, Malaysia & Singapore, 5th Edition, London, Stanley Gibbons, 2018.

**NEGERI SEMBILAN
MALAYSIA NEGARA
MERDEKA
PERANGKAT POS
TERBITAN NEGARA
DALAM URUTAN
WAKTU
1891–1941**



1891

Michel MY-NS 1



1891
Michel MY-NS 3



1893
Michel MY-NS 2



1894
Michel MY-NS 4



1896
Michel MY-NS 7



1896
Michel MY-NS 11



1896
Michel MY-NS 13



1896
Michel MY-NS 14



1897
Michel MY-NS 8



1897
Michel MY-NS 10



1897
Michel MY-NS 12



1898
Michel MY-NS 6



1898
Michel MY-NS 9



1898
Michel MY-NS 16



1898
Michel MY-NS 17



1898
Michel MY-NS 18



1898
Michel MY-NS 19a



1898
Michel MY-NS 19b



1899
Michel MY-NS 5



1900
Michel MY-NS 15



1935
Michel MY-NS 24



1935
Michel MY-NS 25



1935
Michel MY-NS 28



1935
Michel MY-NS 34



1936
Michel MY-NS 30



1936
Michel MY-NS 32



1936
Michel MY-NS 33



1936
Michel MY-NS 35



1936
Michel MY-NS 36



1936
Michel MY-NS 37



1936
Michel MY-NS 38



1937
Michel MY-NS 26



1941
Michel MY-NS 22



1941
Michel MY-NS 23



1941
Michel MY-NS 27



1941
Michel MY-NS 31

Collectively known as **BRITISH MALAYA**

NEGERI SEMBILAN	JOHOR	1824 Holland ceded MALACCA to British East India	1790 Kedah ceded PENANG to British East India	2 August 1824 SINGAPORE became a British Colony
PAHANG	KEDAH	1826 STRAITS SETTLEMENTS established under the control of the British East India Company		
PERAK	KELANTAN			
SELANGOR	PERLIS	1 April 1867 STRAITS SETTLEMENTS became a Crown Colony		
	TERENGGANU			
1895 Federated Malay States	Unfederated Malay States	30 October 1906 Labuan joined the STRAITS SETTLEMENTS		

Collectively known as **BRITISH BORNEO**

1846 Brunei ceded LABUAN to Britain	1882 SABAH governed by British North Borneo Company	1841 Brunei ceded SARAWAK to the White Rajah Dynasty of Sarawak
1848 LABUAN became a Crown Colony	1888 Sabah became British NORTH BORNEO protectorate	
1 January 1890 Labuan annexed to NORTH BORNEO		

1 April 1946 Federated Malay States, Unfederated Malay States, Malacca and Penang formed the MALAYAN UNION		1 April 1946 Labuan annexed to Singapore, which be- came the CROWN COLONY OF SINGAPORE	
31 January 1948 Reformed as the FEDERATION OF MALAYA (The Malay States became British Protectorates)		3 June 1959 SINGAPORE granted self-governance	15 July 1946 Labuan annexed to North Borneo, which became the CROWN COLONY OF BRITISH NORTH BORNEO
31 August 1957 The FEDERATION OF MALAYA granted independence within the British Commonwealth		August 1963 SINGAPORE declared independence	22 July 1963 SARAWAK granted self-governance

1 February 1974 KUALA LUMPUR Federal Territory ceded from Selangor		16 September 1963 The Federation of Malaya, Singapore, British North Borneo (as the State of Sabah) and Sarawak merge to form MALAYSIA	
1 February 2001 PUTRAJAYA Federal Territory ceded from Selangor		9 August 1965 SINGAPORE expelled from Malaysia	16 April 1984 LABUAN Federal Territory ceded from Sabah

